

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tapin



Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan

Jalan Datu Nuraya, Kawasan Perkantoran Rantau Baru,
Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara
Kabupaten Tapin

bappelitbang.tapinkab.go.id

2025



PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN



BAPPELTBANG
KABUPATEN TAPIN

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* anggaran sebanyak 2 (dua) kali selama tahun berjalan. Meskipun demikian Bappelitbang Kabupaten Tapin tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2024. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Rantau, Juni 2025

Bappelitbang Kab. Tapin



Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE, ME

NIP. 19840522 200803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Skala Capaian Kinerja	34
3.2 Analisis Kinerja Bappelitbang	34
Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Kualitas Perencanaan"	34
Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Inovasi Daerah"	91
Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"	102
Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah"	106
3.2 Realisasi Anggaran	108
BAB IV PENUTUP	114
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	7
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	8
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	11
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah	11
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	22
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	34
Tabel 3.2 Tabel skala indeks kualitas perencanaan	35
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Sasaran Kinerja I dengan Rencana strategis	38
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Rembang	40
Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja sasaran kinerja 1 dengan serapan anggaran	42
Tabel 3.6 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan capaian sasaran 1	42
Tabel 3.7 Perbandingan Indeks IGA Tahun 2023 dengan Tahun 2024	92
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis	93
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Bappelitbang Tahun Anggaran 2024	94
Tabel 3.10 Analisis Sasaran, Indikator, Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	95
Tabel 3.11 Analisis Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang serta Program & Kegiatan yang mendukung keberhasilannya	96
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Bappelitbang Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	103

Tabel 3.13 Realisasi Nilai SAKIP Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023	103
Tabel 3.14 Perbandingan realisasi IP ASN Bappelitbang Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.	106
Tabel 3.15 Data Anggaran dan Serapan Anggaran Bappelitbang Kab. Tapin Tahun Anggaran 2024	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	3
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Realisasi IKP Tahun 2021-2024	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, dimana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin mempunyai fungsi:

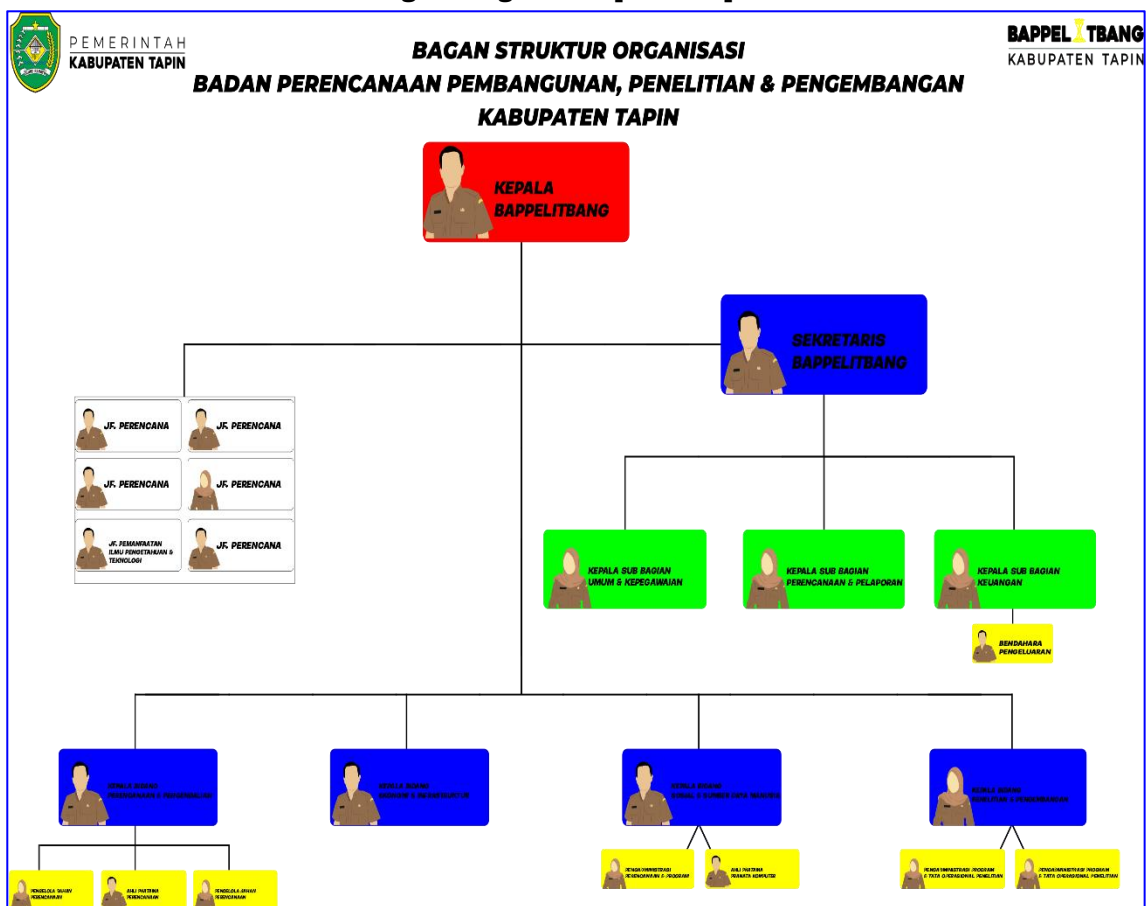
1. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. mengoordinasikan, membina, mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah;
4. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dengan OPD dan BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
5. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD;
6. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya;
7. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi;
8. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
9. mengoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
10. mengoordinasikan dan membina secara teknis dan administratif serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
11. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan

12. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Berikut bagan struktur organisasi Bappelitbang kabupaten Tapin.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin



Sumber: Data Kepegawaian Bappelitbang Kab. Tapin 2024

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Adapun

anggaran yang dimiliki oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp15.692.805.823
APBD	Tahun n	Rp17.370.318.367

Sumber : DPA Bappelitbang 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	7,75	8,10	8,20
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65	67	70
3.	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,35	79,25	80,65
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70	80	90

Sumber: Renstra Bappelitbang Kab. Tapin Periode 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	Nilai SAKIP adalah hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.	Perencanaan Kinerja = 30% Pengukuran Kinerja = 25% Pelaporan Kinerja = 15% Evaluasi Kinerja = 10 % Capaian Kinerja = 20%	LHE AKIP Bappelit bang
2.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan beberapa aspek, seperti kompetensi, kinerja, kedisiplinan, dan kualifikasi pendidikan.	Perhitungan IP ASN yang diformulasikan berdasarkan 4 Dimensi yaitu: ➤ Dimensi KUALIFIKASI (Bobot dimensi 25 Persen) ➤ Dimensi KOMPETENSI (Bobot dimensi 40 Persen) ➤ Dimensi KINERJA (Bobot dimensi 30 Persen)	Aplikasi MyASN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					➤ Dimensi DISIPLIN (Bobot dimensi 5 Persen)	
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) untuk mengukur kualitas perencanaan. IKP dihitung berdasarkan persepsi dan dokumentasi, menggunakan metode FGD dan kuesioner yang mencakup dimensi proses, isi, dan jaminan tindak lanjut dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.	$IKP = \frac{\sum(P_i \cdot W_i)}{\sum W_i}$ <p>Keterangan: P_i = Nilai atau skor untuk setiap indikator perencanaan (misalnya, efisiensi, efektivitas, partisipasi, waktu, biaya, dll). W_i = Bobot atau tingkat kepentingan dari indikator tersebut. $\sum(P_i \cdot W_i)$ = Jumlah nilai indikator yang dikalikan dengan bobotnya. $\sum W_i$ = Jumlah total bobot dari semua indikator yang digunakan.</p>	Survei IKP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	Nilai	Sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Indeks ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai IGA diperoleh dari Indeks Government Awards dari Kemendagri Kriteria: 60-100 = Sangat inovatif 30-59,99 = Inovatif 0,01-29,99 = Kurang Inovatif	SK Mendagri tentang IGA

Sumber: SK Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kab. Tapin 2024-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Eselon II			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	7,75
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70
Eselon III			
	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP: Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal	24,60 25,00 11,55 17,85
	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Score 4.0
	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan	100%
	Meningkatnya Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100%
	Meningkatnya inovasi daerah yang berkelanjutan	Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	70%
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM, dan Bidang yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur, dan Bidang yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD (Program, Indikator dan Target Kinerja)	100%
		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita Acara forum satu data	80
		Meningkatnya proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perangkat Daerah yang Tepat waktu	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu	100%
		Persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	91,72
	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM	80%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	80%
Eselon IV			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
2	meningkatkan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya kualitas Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
4	meningkatkan tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%
5	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%
6	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%
7	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		ketentuan	
8	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	100%
9	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
10	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
11	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti	100%
12	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
13	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan	100%
14	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
15	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
16	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi ditindaklanjuti	100%
17	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
18	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai jadwal dan ketentuan	100%
19	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
20	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
21	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur ditindaklanjuti	100%
22	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
23	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai jadwal dan ketentuan	100%
24	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
25	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
26	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia ditindaklanjuti	100%
27	Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
28	Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai jadwal dan ketentuan	100%
29	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
30	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
31	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial ditindaklanjuti	100%
32	Meningkatnya peran aktif Inovator dalam mendukung Inovasi Daerah	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	24,54%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
33	Melaksanakan Pembinaan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100%
34	Terlaksananya monitoring dan evaluasi inovasi Daerah	Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	73,61%
35	Melaksanakan fasilitasi inovasi daerah yang direplikasi	Persentase fasilitasi inovasi daerah yang direplikasi	100%
36	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Daerah	Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	95%
37	Meningkatnya Rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Iptek)	50%
38	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%
39	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan yang sesuai isu strategis	Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	100%
40	Meningkatnya Rekomendasi Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%
41	Terlaksananya Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	100%
Pelaksana			
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang
6	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
7	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
8	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
9	Tersedianya Paket Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
10	Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
11	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
12	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
13	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
14	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
15	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
16	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit
17	Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit
18	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit
19	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
20	Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	3 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Perangkat Daerah	Daerah Bidang Pemerintahan	
21	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan
22	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
23	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
24	Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan
25	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan
26	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
27	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
28	Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan
29	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
30	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
31	Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan
32	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan
33	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen
34	Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
35	Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
36	Tersedianya Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan
37	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
38	Tersedianya Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan
39	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan
40	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan
41	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Teknologi	
42	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
43	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen
44	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen
45	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
46	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
47	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan

Sumber: Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kab. Tapin Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP:	
		- Perencanaan Kinerja	24,60
		- Pengukuran Kinerja	25,00
		- Pelaporan Kinerja	11,55
		- Evaluasi Internal	17,85
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN dengan capaian	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		kinerja >90%		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Score 4.0	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100%	
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	
	3.	Penyedia Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	
		Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%	
	6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Bangunan Kantor		
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket
10.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
11.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit
18.	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator)	100%
		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data	100%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat waktu	100%
		Persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	91.72%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	80%
7. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
19.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen
20.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
21.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
22.	Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan
23.	Koordinasi Penyusunan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ kota	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	n
8.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang	100%
24.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan
25.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 orang
9.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti	100%
26.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan
27.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase Keselarasan Renja OPD bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang Tepat waktu	100%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu	100%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM	80%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%
10.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial ditindaklanjuti	
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia ditindaklanjuti	100%
28.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
29.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Bidang Pemerintahan		
30.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan
31.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
32.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
33.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan
34.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan
35.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Ekonomi yang ditindaklanjuti	
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi ditindaklanjuti	100%
	36. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
	37. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan
	38. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai jadwal dan ketentuan	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Infrastruktur ditindaklanjuti	100%
39.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
40.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan
41.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan	100%
		Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	
13.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	100%
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	100%
42.	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial	1 Dokumen
43.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	33,74%
		Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100%
		Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	76,69%
		Persentase fasilitasi inovasi daerah yang direplikasi	100%
		Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	90%
		Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Iptek)	100%
44.	Penelitian, pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan
45.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
46.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
47.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappelitbang Kab. Tapin Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. Analisis Kinerja Bappelitbang

Tahun 2024, kinerja bappelitbang menunjukkan kondisi yang cukup baik. Gambaran kinerja bappelitbang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, telah ditetapkan melalui Perjnjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang selaku Pihak Pertama dan Bupati Tapin selaku Pihak Pertama bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin memiliki sasaran kinerja yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Perencanaan (IKP). Fungsi pengukuran perencanaan pembangunan daerah diharapkan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah, membantu mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Pengukuran indeks ini bertujuan mengukur seberapa besar kualitas perencanaan di Kabupaten Tapin, sehingga pemerintah kabupaten Tapin dapat melakukan implementasi perencanaan yang berkelanjutan. Bappelitbang Kabupaten Tapin menargetkan Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,76 dan terealisasi sebesar 7,76 atau 100% capaian kinerjanya.

Tabel 3.2
Tabel skala indeks Kualitas Perencanaan

Skala	kategori
1,0-2,0	Sangat Kurang
2,1-4,0	Kurang
4,1-6,0	Cukup
6,1-8,0	Baik
8,1-10	Sangat Baik

Sumber: data diolah

Indeks Kualitas Perencanaan, dalam proses perhitungannya mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi proses, dimensi isi dan dimensi tindak lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran IKP, ketiga dimensi tersebut, dimensi proses pada bagian musrenbang kecamatan yang memiliki nilai kontribusi lebih rendah apabila dibandingkan dengan proses yang lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan,

masih ada aspek-aspek perencanaan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Beberapa kemungkinan yang dimaksud dengan peningkatan kualitas perencanaan dalam Musrenbang Kecamatan antara lain:

- a) Penyusunan Program yang lebih matang, perencanaan harus lebih realistis, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b) Meningkatkan keterlibatan warga, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar usulan lebih representatif.
- c) Koordinasi Antar Pihak – Memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan instansi terkait agar perencanaan lebih sinkron.
- d) Memastikan bahwa proyek atau program yang diusulkan benar-benar prioritas dan memiliki dampak yang signifikan.
- e) Memperbaiki cara mendokumentasikan hasil Musrenbang agar keputusan dapat ditindaklanjuti dengan efektif.

1. Perbandingan realisasi Sasaran Kinerja 1 “Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah” tahun 2021-2024

Sasaran kinerja ini diukur dengan indikator “Indeks Kualitas Perencanaan”. Adapun perbandingan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis ini selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir bersifat sedikit fluktuatif, seperti yang tertera pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai Realisasi IKP 2021-2024



Sumber: laporan IKP Bappelitbang 2021-2024

Meskipun nilai realisasi Indeks Kualitas Perencanaan berubah naik turun, namun trend nya cenderung naik pada 2 (dua) tahun terakhir. Kondisi nilai realisasi tersebut masih dalam kategori “**baik**” dan Bappelitbang Kabupaten Tapin berusaha mempertahankan nilai IKP yang baik namun terus berusaha untuk menjadi “sangat baik” untuk kedepannya. Upaya yang akan terus dilakukan untuk minimal mempertahankan nilai indeks dan berusaha meningkatkan nilai IKP yaitu dengan secara konsisten melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten baik dalam proses penyusunan perencanaan, isi perencanaan yang logis, aspiratif, dan konsisten dengan visi misi pemerintahan, dan tindak lanjut maupun serapan anggaran.

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi IKP tahun 2024 menunjukkan progres yang meningkat mendekati target akhir renstra. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir rencana strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	7,76	8,20	93,29

Sumber: dokumen Renstra Bappelitbang 2024-2026 dan laporan monev 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa realisasi kinerja IKP tahun 2024 telah berprogres mendekati nilai target IKP pada akhir tahun Renstra atau tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi sasaran kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota yang sejenis

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan tidak ada standar di tingkat nasional, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Belum semua daerah baik kabupaten/kota maupun tingkat provinsi menggunakan indikator kinerja ini. Dari berbagai daerah yang ada baru Kabupaten Rembang di Provinsi Jawa Tengah yang telah menggunakan indikator kinerja ini. Sehingga pemilihan pembanding realisasi indikator kinerja IKP dipilihlah Kabupaten Rembang. Adapun perbandingan realisasi nilai IKP adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Rembang**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Daerah lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	7,76	8,06 (Kab. Rembang)

Sumber: Monev Renaksi Bappelitbang 2024 & LKIP Bappeda Rembang

Dari tabel dapat dilihat perbandingan realisasi nilai indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan di Bappelitbang Kabupaten Tapin yaitu 7,76 dan Indeks Kualitas Perencanaan di Bappeda

kabupaten Rembang senilai 8,06. Kedua nilai IKP ini tidak dapat menunjukkan kontribusi satu dan yang lainnya. Hanya saja perbandingan nilai IKP ini menunjukkan kualitas perencanaan di Kabupaten Rembang lebih baik dibandingkan di Kabupaten Tapin.

4. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Alternatif Solusi

Pencapaian realisasi indikator kinerja utama dari Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) menggambarkan proses perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik. Hal ini berarti seluruh tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) telah dilakukan secara terstruktur, partisipatif, berbasis data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan baik berarti tidak hanya berupa dokumen perencanaan saja, tetapi bagaimana prosesnya mampu menghasilkan rencana yang berkualitas, dapat dilaksanakan, dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin. Dalam mewujudkan realisasi Indeks Kualitas Perencanaan yang sesuai target tentu saja terdapat hal-hal yang mendukung tercapainya target Indeks Kualitas Perencanaan, yaitu:

- a. Kapasitas SDM Perencana yang memadai secara kualitas serta adanya pelatihan teknis terkait perencanaan.
- b. Ketersediaan informasi dan data-data yang valid, mutakhir. Basis data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi dengan sistem seperti SIPD.
- c. Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan kolaborasi lintas sektor berjalan dengan baik. Sinkronisasi yang baik antara dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (RENSTRA, RENJA), sampai halnya pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

- d. Keterlibatan para pemangku kepentingan dan stakeholder, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan berjalan dengan baik. Keterlibatan antara level legislatif, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dalam proses perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.
- e. Dukungan kebijakan daerah dari kepala daerah melalui komitmen terhadap perencanaan yang berbasis bukti dan hasil.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan yang efektif melalui mekanisme evaluasi kinerja dan adanya tindak lanjut dari rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari instansi lain.

Berdasarkan laporan hasil Indeks Kualitas Perencanaan, dari beberapa komponen penilaiannya, bobot nilai yang rendah pada level musrenbang kecamatan. nilai komponen dari Musrenbang Kecamatan yang lebih rendah dibandingkan bobot lain ini karena koordinasi pada pelaksanaan musrenbang kecamatan kurnag berjalan dengan baik. Meskipun demikian, proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik. Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

- ⇒ Perencanaan di tingkat kecamatan harus realistis, berbasis data dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- ⇒ Meningkatkan keterlibatan warga masyarakat, pemangku kepentingan agar usulan lebih representatif
- ⇒ Koordinasi yang lebih baik pada instansi vertikal ke bawah di kecamatan.
- ⇒ Memastikan usulan benar-benar prioritas dan memiliki dampak yang signifikan.

5. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tingkat capaian kinerja sasaran ini lebih tinggi dari realisasi anggaran program pendukung sasaran tersebut. Pelaksanaan kegiatan yang efisien dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari yang dianggarkan. Hal ini terjadi karena adanya penghematan biaya, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, atau penerapan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas kinerja. Gambaran perbandingan capaian kinerja dengan capaian anggaran dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Reali sasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6/8)*100
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	7,75	7,76	100	4.875.215.120	3.865.316.325	79,28	124,49

Sumber: Laporan Monev Renja TW4 Bappelitbang 2024

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6
Program/Kegiatan penunjang keberhasilan capaian sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	100	Program Perencanaan dan Pengendalian	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu	100	Menunjang	Pelaksanaan Program Perencanaan dan Pengendalian mendukung kinerja sasaran emningkatnya kualitas perencanaan dan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	daerah				Presentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	109,03		pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja sasaran ini menghitung kualitas antar dimensi perencanaan, dari proses, isi dan tindak lanjut. Proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam program ini. Dari awal penyusunan dokumen perencanaan yang diawali dari proses forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, musrenbang daerah baik dari desa/ kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, sampai dengan menjadi dokumen perencanaan yang disahkan. Tidak
					Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator dan Target Kinerja)	100		hanya dalam perencanaan, namun dalam berjalannya tahun anggaran yang ada, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah tetap perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi, selain itu ada pembinaan dan kebutuhan data-data untuk pengambilan keputusan. Pengendalian kegiatan selama tahun berjalan yaitu melalui koordinasi antar perangkat daerah sehingga tujuan dan sasaran daerah dapat tercapai.
					Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita Acara forum satu data	125		
					Rata-rata	122,16		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM, dan Bidang yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100	Menunjang	Perencanaan pembangunan daerah dijabarkan kepada para perangkat daerah pengampu yang mendukung tujuan dan sasaran daerah. Sehingga didukung oleh Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan. Program ini mendukung sasaran kinerja kesatu dalam hal perencanaan pada perangkat daerah, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah pada tahun berjalan, serta melakukan koordinasi yang antar perangkat daerah.
					Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur, dan Bidang	100		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100		
					Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100		
					Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur disusun tepat	111,11		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					waktu dan sesuai standar	111,11		
					Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu	139,24		
					Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perangkat	146,09		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Daerah yang Tepat waktu			
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM			
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur			

Sumber: monev Renaksi Bappelitbang 2024

Adapun penjabaran program-program penunjang Indikator Kinerja dari Indeks Kualitas Perencanaan antara lain:

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Program ini mendukung Sasaran Strategis bappelitbang “Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah”, dengan indikator kinerjanya Indeks Kualitas Perencanaan. Program ini terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pendanaan, kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan ketiga kegiatan ini saling berkaitan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tujuan pelaksanaan program ini yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas suatu perencanaan berdasarkan berbagai aspek antar lain ketepatan,

keterpaduan, kelengkapan, serta implementabilitas suatu dokumen perencanaan. IKP dihitung berdasarkan persepsi dan dokumentasi, menggunakan metode FGD dan kuesioner yang mencakup dimensi proses, dimensi isi, dan dimensi tindak lanjut dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dimensi proses mencakup Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, yang dinilai berdasarkan persepsi melalui kuesioner. Dimensi Isi dinilai secara dokumentatif dan persepsional. Dimensi Tindak Lanjut diperoleh nilai dari dokumentasi, terutama RPJMD, RKPD tahun berjalan, DPA Perangkat Daerah dan Laporan Monev dari Bappelitbang. Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) yang tinggi dapat dikaitkan dengan peningkatan kapasitas suatu organisasi atau institusi untuk berinovasi. Perencanaan yang berkualitas artinya dokumen perencanaan tersebut terarah, terukur, konsisten, berbasis data, serta mampu diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dapat menjadi sebuah pedoman yang membawa manfaat bagi daerah dan masyarakatnya.

Kaitan program ini dengan nilai Indeks Kualitas Perencanaan yaitu ada pada seluruh dimensi dari proses, isi dan tindak lanjut. Pada pada tahap awal proses perencanaan yaitu musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, Ketiga musrenbang ini merupakan dimensi proses yang mana menjadi tahapan awal perencanaan. Dalam program ini ada pelaksanaan forum perangkat daerah, forum konsultasi publik, yang nantinya akan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan masuk pada dimensi isi IKP. Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini membutuhkan analisis data dan informasi dan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan yang dapat digunakan sebagai data awal dokumen perencanaan. Tentunya

penyusunan dokumen perencanaan ini harus sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah ditentukan. Kemudian pada dimensi tindak lanjut, bagaimana dokumen perencanaan menilai kesiapan mengimplementasi dan di evaluasi. Implementasi ini terkait dengan kesiapan anggaran, monitoring dan evaluasi, fleksibilitas terhadap perubahan serta mekanisme perbaikan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh 3 kegiatan dan 9 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan menyusun Dokumen, jadwal Kegiatan dan Koordinasi semua Stake Holder yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan agar menghasilkan Dokumen yang sesuai standar dan tepat waktu. Tujuan dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah 1) Tersedianya jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan, 2) Terlaksananya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan, dan 3) Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung oleh sub Kegiatan berikut:

- a) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Penyusunan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah

dimaksudkan untuk memberikan output berupa Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, yang merupakan implementasi dan pelaksanaan amanat peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mana Pemerintah Pusat dan Pemerinh Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) untuk daerah.

Tujuan dari Pelaksanaan Sub-Kegiatan ini adalah:

- Tersediannya data dan informasi kondisi daerah (Capaian Pembangunan dan Permasalahan Daerah) untuk penyusunan Dokumen RKPD
- Teridentifikasinya isu-isu strategis pembangunan sebagai dasar perumusan prioritas.
- Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Data yang diminta kepada Organisasi Perangkat Daerah terkadang sangat lambat dalam menyerahkan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen tersebut. Risiko ini diminimalisir dengan cara penyertaan batas waktu dalam menyurati Organisasi Perangkat Daerah.

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp290.950.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp65.373.000,00 atau sebesar 22.47% dari total Anggaran.

b) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum PD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau Lintas Perangkat Daerah sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Pelaksanaan Forum PD atau Lintas Perangkat Daerah memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum PD atau Lintas Perangkat Daerah dapat tetap dilakukan. Jumlah Forum PD dan Lintas Perangkat Daerah serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappelitbang, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum PD atau Lintas Perangkat Daerah yang dibentuk. Bappelitbang memprioritaskan pembentukan Forum PD dan Lintas Perangkat Daerah pada:

- Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan

- SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan Kabupaten tersebut. Sebagai contoh: Forum PD Pendidikan, Forum PD Kesehatan.

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Usulan-usulan prioritas yang masuk dari Kecamatan atas usulan dari musrenbang desa terkadang salah usul baik nama kegiatannya maupun Organisasi Perangkat Daerah tujuan. Dan alternatif solusi yang diambil adalah bahwa Pada saat musrenbang kecamatan, kecamatan lebih baik berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang dituju apakah nama kegiatan dan perangkat daerahnya sudah tepat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp47.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.050.000,00 atau sebesar 90.50% dari total Anggaran.

c) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/ kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya. Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Dengan terlaksanannya sub kegiatan ini maka diharapkan dapat Terverifikasinya daftar prioritas kegiatan

pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau Lintas Perangkat Daerah, yang siap dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan. Hal-hal yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain:

- Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.
- Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Risiko yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 98 ayat 3 Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari, sehingga Alternatif Solusi yang dilaksanakan adalah Berkoordinasi dengan Protokol dan Pimpinan Daerah untuk menetapkan jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di

Kecamatan jauh hari sebelum Musrenbang Kabupaten dikecamatan dillaksanaan. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp420.681.500,00 dan terealisasi sebesar Rp405.495.500,00 atau sebesar 96.39% dari total Anggaran.

d) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah melalui forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Maksud penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten adalah merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka penyempurnaan dokumen rancangan RKPD Kabupaten. Dasar pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah:

- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
- Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun tujuan Musrenbang Kabupaten adalah:

- Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan pemerintah provinsi;
- Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan;
- Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten.

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp112.202.500,00 dan terealisasi sebesar Rp84.960.000,00 atau sebesar 75.72% dari total Anggaran.

e) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan memastikan seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), Jangka menengah (RPJMD), dan Jangka pendek (RKPD), dapat berjalan secara sistematis, tepat waktu, berkesinambungan bersama dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, namun tetap sesuai dengan ketentuan. Koordinasi selain dalam daerah tersebut tentu saja dengan level di atasnya seperti provinsi dan pusat agar tetap selaras perencanaan pembangunan daerah antara kebijakan pusat/provinsi dengan di daerah.

Pada tahun 2024 yang lalu, Bappelitbang melaksanakan sub kegiatan ini dengan hasil output berupa dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD), dokumen jangka menengah teknokratik (RPJMS Teknokratik) dan tahunan (RKPD). Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp1.443.068.500 dan terealisasi sebesar Rp1.391.477.800 atau sebesar 96,42% dari total Anggaran.

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup kegiatan mengumpulkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, seperti data statistik, laporan perangkat daerah, hasil survei, data sektoral, dan data spasial. Data tersebut mencakup bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, sosial, dan tata ruang. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan, menilai capaian indikator kinerja pembangunan sebelumnya, melihat tren, ketimpangan, atau kesenjangan antar wilayah atau kelompok masyarakat, menilai potensi dan sumber daya yang bisa dioptimalkan, dan menyusun proyeksi kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan ke depan. Analisis ini menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja. Tanpa analisis yang memadai, perencanaan cenderung tidak tepat sasaran, tidak efektif, atau bahkan tumpang tindih antar program.

Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu:

a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dsalam hal penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dari Pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah Sesuai dengan ketentuan.

b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memahami, mampu mengelola, dan memanfaatkan data serta informasi perencanaan secara baik, konsisten, dan terpadu dalam mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian

a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan dan dilakukan secara sistematis, kontinu terhadap suatu kegiatan untuk memastikan berjalannya sebuah aktivitas sesuai dengan rencana. Hasil monitoring adalah serangkaian data yang akan digunakan untuk bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan tindakan

koreksi atau langkah-langkah untuk penyempurnaan selanjutnya. Evaluasi adalah proses yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid, seberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. Kebutuhan akan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Tujuan monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk

mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Tujuan monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Risiko yang umum ditemui dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan Triwulanan baik triwulan I, Triwulan II, triwulan III maupun triwulan IV) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terlambat untuk dilaporkan dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan Triwulanan baik triwulan I, Triwulan II, triwulan III maupun triwulan IV yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum sesuai standar. Sedangkan alternatif solusi yang

diambil adalah Menghindari Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah terlambat untuk dilaporkan bisa dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Organisasi Perangkat Daerah dengan memberikan batas waktu pelaporan dan memperbaiki laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah beberapa belum sesuai standar dilakukan dengan verifikasi laporan tersebut. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp244.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp150.500.000,00 atau sebesar 61.68% dari total Anggaran.

a) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini juga mendukung sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah”, dengan indikator kinerja nya Indeks Kualitas Perencanaan. Kegiatan yang mendukung dalam program ini yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan dan sektor dapat berjalan secara selaras, efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka pembangunan daerah dapat lebih terarah dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Program ini melaksanakan kegiatan lanjutan ke tingkat perangkat daerah untuk meneruskan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berada pada level pemerintahan daerah.

Koordinasi yang dilakukan adalah lintas sektor terkait kemiskinan, stunting, bedah rumah, pertanahan, permukiman, infrastruktur dll. Selain itu program ini terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, baik dalam tahap awal perencanaannya, pembinaan, monitoring dan evaluasi perangkat daerah. Koordinasi antar perangkat daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan koordinasi yang baik, perangkat daerah dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh 3 Kegiatan dan 14 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini memiliki 8 Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaannya yaitu 1) Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sub bidang Sosial dan SDM sesuai dengan ketentuan dimana Jadwal perencanaan pembangunan perangkat daerah mengacu kepada jadwal yang telah diatur di dalam Surat Edaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan dokumen perencanaan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses perencanaan pembangunan perencanaan daerah juga telah mengacu kepada dua hal tersebut. Capaian dari indikator kegiatan ini sebesar 100% karena pada dasarnya perangkat daerah telah mengetahui dan mengikuti alur proses jadwal perencanaan dengan baik; 2) Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial dan SDM sesuai jadwal dan ketentuan dimana Jadwal perencanaan pembangunan perangkat daerah

mengacu kepada jadwal yang telah diatur di dalam Surat Edaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan dokumen perencanaan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses perencanaan pembangunan perencanaan daerah juga telah mengacu kepada dua hal tersebut. Capaian dari indikator kegiatan ini sebesar 100% karena telah dilakukan beberapa kali sosialisasi mengenai jadwal dan tahapan perencanaan pembangunan perangkat daerah, sehingga pada saat pengumpulan dokumen maupun penginputan perencanaan anggaran dilakukan sesuai dengan timeline dan tepat waktu; 3) Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti dimana capaian dari indikator kegiatan ini sebesar 100% dikarenakan perangkat daerah dapat optimal menindaklanjuti hasil rekomendasi dari koordinasi yang dilaksanakan antara bappelitbang dengan perangkat daerah pengampu lingkup Sosial dan SDM, dalam hal ini terkait dengan koordinasi Pengentasan Kemiskinan, Kawasan Perdesaan, Percepatan Penurunan Stunting, Kota Layak Anak, Kabupaten/Kota Sehat, Pangan dan Gizi.; 4) Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial dan SDM Sesuai dengan ketentuan dimana capaian dari indikator kegiatan ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan perangkat daerah telah mengetahui proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan baik. Sehingga dokumen yang telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah dan petunjuk teknis yang ada di dalam peraturan menteri dalam negeri. 5) Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti dimana Capaian dari indikator ini sebesar 100% karena dari hasil

rekomendasi asistensi penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan senantiasa ditindaklanjuti oleh perangkat daerah mitra sub bidang Sosial dan SDM dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan perangkat daerah tersebut. asistensi dokumen perencanaan mulai dari penyusunan pohon kinerja perangkat daerah berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah mulai dari level tertinggi hingga level terendah, kemudian penetapan target indikator kinerja dan narasi yang terdapat di dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah, serta keselarasan terhadap program dan kegiatan rencana pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. 6) Persentase Hasil Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah Sub Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti dimana indikator ini memiliki capaian kinerja sebesar 100%, dimana dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah diasistensi kemudian dilakukan reviu oleh inspektorat yang kemudian Laporan Hasil Reviu tersebut ditindaklanjuti kembali oleh perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan untuk memastikan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh perangkat daerah berkualitas baik; 7) Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Sosial dan SDM sesuai dengan ketentuan dimana Hasil capaian indikator ini sebesar 100%, dimana setiap perangkat daerah pada lingkup bidang Sosial dan SDM mampu mengukur dan mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dilaksanakan dengan baik dalam hal ini penyampaian pelaporan monitoring evaluasi triwulanan yang disampaikan oleh perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan menteri dalam negeri

serta disampaikan tepat waktu pada awal bulan setelah periode triwulanan berakhir; 8) Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Ekonomi ditindaklanjuti dimana Capaian dari indikator ini sebesar 100% karena dari hasil rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah beserta indikator program, kegiatan dan sub kegiatan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah mitra sub bidang Sosial dan SDM yang kemudian akan kembali disampaikan melalui mitra bappelitbang untuk di cek kembali apakah tindaklanjut perbaikan yang direkomendasikan telah dikerjakan dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung oleh 8 Sub-kegiatan sebagai berikut:

3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan dalam hal ini terdapat 9 perangkat daerah yang menjadi mitra bappelitbang Sub bidang Sosial. Adapun koordinasi yang biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada program pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian program prioritas kabupaten di lingkup Sub bidang Sosial. Beberapa koordinasi yang dilaksanakan ditahun ini diantaranya dalam hal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim daerah melalui Rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

bersama Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, koordinasi terkait Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selanjutnya koordinasi terkait penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan koordinasi awal terkait Pemetaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan (RPKD) Kabupaten Tapin. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak selarasnya program yang tercantum di renstra perangkat daerah dengan program yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPJMD). Alternatif Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi risiko adalah dengan melakukan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah untuk dapat mengarahkan program dan kegiatan yang dijalankan baik jangka menengah dan tahunan selaras untuk mendukung pencapaian program-program baik daerah, provinsi maupun pusat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp85.122.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.050.000,00 atau sebesar 76.42% dari total Anggaran.

3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Sosial bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah

ditetapkan. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD, sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut adalah pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan serta problem solving secara tertutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp64.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp54.040.000,00 atau sebesar 83.56% dari total Anggaran

3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Sub kegiatan ini koordinasi serta asistensi kepada mitra bidang Sosial bappelitbang yang berfokus kepada penyusunan laporan monitoring dan evaluasi terhadap renja/dpa perangkat daerah lingkup sub bidang Sosial agar laporan hasil monitoring dan evaluasi renja perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di tahun berikutnya. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah tidak selarasnya prioritas program

kegiatan yang tercantum di renja perangkat berdasarkan capaian tahun sebelumnya, karena laporan hasil monev renja tidak dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan renja tahun berikutnya yang ditindaklanjuti dengan cara melakukan asistensi secara berkala kepada setiap perangkat daerah dalam penyusunan laporan monev renja perangkat daerah tahunan, serta problem solving baik secara terbuka maupun tertutup dengan perangkat daerah mengenai hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp28.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.890.000,00 atau sebesar 69.74% dari total Anggaran.

3.4. Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan pusat daerah. Tahun 2024 Sub Bidang Pemerintahan melaksanakan 2 (Dua) Rencana Aksi Daerah, antara lain

1. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Kabupaten Tapin merupakan kabupaten dengan jumlah warga miskin terkecil dan urutan kedua terkecil dalam persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kenyataan tersebut maka masalah penanggulangan kemiskinan bisa dikatakan merupakan sesuatu yang menantang, yaitu menantang untuk menjadikan Kabupaten Tapin sebagai kabupaten dengan jumlah warga miskin yang

paling sedikit jumlahnya dan sekaligus persentase terendah di Provinsi Kalimantan Selatan. Guna menjawab tantangan tersebut diperlukan upaya yang lebih terarah, lebih sistematis, dan lebih banyak membuahakan hasil yang baik. Untuk itu diperlukan panduan yang dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan, yaitu para pelaku penanggulangan kemiskinan, warga miskin itu sendiri dan masyarakat luas. Oleh karena itu perlu disusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Untuk dapat mendorong konvergensi dan keterpaduan program, Pemerintah Kabupaten Tapin telah memadankan data dari berbagai basis data kesejahteraan masyarakat maupun data program Penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Tapin telah dan terus berupaya untuk memperbaiki integrasi data lintas sektor untuk upaya penanggulangan kemiskinan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersedia arah dan panduan upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan;
- b. Terwujud keselarasan, kesinambungan dan sinergi program dan kegiatan pada semua pelaku penanggulangan kemiskinan;
- c. Terwujud pengarus-utamaan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapin;
- d. Terumuskannya komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),

khususnya pada tujuan penanggulangan kemiskinan;

- e. Memastikan program-program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat proses.

2. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2028

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan amanat ini, maka perlu disusun Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten/kota/desa di masa mendatang (RPJM Daerah dan RPJMDesa) dan RTRW Kabupaten/Kota. RPKP ini akan menjadi acuan dalam menyusun program aksi tahunan berikutnya bagi seluruh SKPD terkait dalam menyusun rencana teknis yang lebih detail (detail engineering design/DED) maupun bisnis plan sesuai komoditi yang akan dikembangkan. RPKP ini sekaligus akan menjadi landasan kerja bagi pelaksana kegiatan unit kerja lain Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan khususnya, dan umumnya bagi unit kerja lain di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian/Lembaga terkait.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai bahan

masukannya bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten untuk diusulkan kepada Bupati menjadi RPKP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan

- c. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Dana yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp318.544.500 dan terealisasi Rp313.623.300 atau sebesar 98,46% dari total anggaran yang disediakan.

3.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dalam hal ini terdapat 9 perangkat daerah yang menjadi mitra bappelitbang lingkup SDM. Adapun koordinasi yang biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada program pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian program prioritas kabupaten di lingkup ekonomi. Beberapa koordinasi yang dilaksanakan ditahun 2024 diantaranya dalam hal ini terkait dengan Penanganan Stunting, koordinasi Kabupaten Layak Anak dan Koordinasi terkait Kabupaten Kota Sehat yg diketuai oleh bappelitbang dan Pengarusutamaan Gender. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak selarasnya program yang tercantum di renstra perangkat daerah dengan program yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPJMD). Dan

alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lain yang berhubungan untuk dapat mengarahkan program dan kegiatan yang dijalankan baik jangka menengah dan tahunan selaras untuk mendukung pencapaian program-program baik daerah, provinsi maupun pusat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp84.628.600,00 dan terealisasi sebesar Rp62.370.000,00 atau sebesar 73.70% dari total Anggaran.

3.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang SDM bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD. Alternatif Solusi yang dilaksanakan adalah pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan serta problem solving secara tertutup dengan perangkat daerah. Dana yang

disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp69.987.000,00 dan terealisasi sebesar Rp57.600.000,00 atau sebesar 82.30% dari total Anggaran

3.7. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini koordinasi serta asistensi kepada mitra bidang Sosial bappelitbang yang berfokus kepada penyusunan laporan monitoring dan evaluasi terhadap renja/dpa perangkat daerah lingkup sub bidang Sosial agar laporan hasil monitoring dan evaluasi renja perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di tahun berikutnya. Risiko yang umum dihadapi dalam pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah tidak selarasnya prioritas program kegiatan yang tercantum di renja perangkat berdasarkan capaian tahun sebelumnya, karena laporan hasil monev renja tidak dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan renja tahun berikutnya yang ditindaklanjuti dengan cara melakukan asistensi secara berkala kepada setiap perangkat daerah dalam penyusunan laporan monev renja perangkat daerah tahunan, serta problem solving baik secara terbuka maupun tertutup dengan perangkat daerah mengenai hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp28.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.890.000,00 atau sebesar 69.74% dari total Anggaran.

3.8. Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan pusat daerah. Tahun 2024 Sub Bidang SDM melaksanakan 3 (tiga) Rencana Aksi Daerah, antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan usaha pemerintah kabupaten dalam membangun kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan, berorientasi pada implementasi konvensi hak dan kewajiban anak. Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin melakukan kegiatan Penyusunan terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tapin dengan mengacu pada sumber data sesuai keadaan sebenarnya terkait hak-hak anak, sehingga dapat mengembangkan Kabupaten Layak Anak dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan yang terbaru tentang pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tapin. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) yaitu untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak di Kabupaten Tapin;
- b. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai bahan masukan bagi seluruh unsur Masyarakat luas di daerah tentang kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung. dan
- c. Memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam Menyusun Peraturan Bupati terkait Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA).

Penyusunan dan pelaksanaan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak. Dokumen ini juga diharapkan sebagai kerangka acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) untuk bersinergi bersama mewujudkan Kabupaten Tapin untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.

2. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Kabupaten/Kota Sehat diartikan sebagai suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan

beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Konsep Kabupaten/Kota Sehat ini tidak hanya memfokuskan pada pelayanan kesehatan yang lebih ditekankan pada suatu pendekatan kondisi sehat dan problem sakit saja, tetapi juga kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.

Pada perkembangannya sejak penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat Kabupaten Tapin telah meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda pada tahun 2005. Namun sampai dengan tahun 2023 tidak ada lagi penghargaan yang diraih. Oleh karena itu penting dan perlu Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin melakukan kegiatan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Tapin sebagai gambaran kondisi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program kegiatan dan indikator keberhasilan yang terbaru tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Tapin.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Tapin yaitu untuk:

- a) Memberikan gambaran dalam penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat di Kabupaten Tapin

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

- b) Memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai kerangka acuan dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat di Kabupaten Tapin.

3. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Pemerintah Kabupaten Tapin memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (baik laki-laki atau perempuan) untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses seluruh hasil kegiatan pembangunan daerah melalui konsep pengarusutamaan gender yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak seluruh lapisan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat

dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender.

Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Bappelitbang Kabupaten Tapin memandang perlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Kegiatan ini ini dinilai cukup penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapin. Selanjutnya dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 diharapkan dapat memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender dimana terdapat perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender sehingga terwujudnya kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melakukan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan di Daerah dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 yaitu untuk:

- a) Menggambarkan analisis situasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Tapin;
- b) Menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara lebih konkrit dan terarah pada setiap aspek pembangunan guna terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
- c) Memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun Peraturan

Bupati terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG).

Dana yang disiapkan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Rp.284.755.000 dan terealisasi sebesar Rp.264.666.125 atau sebesar 92.95% dari total anggaran yang disediakan.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Kegiatan ini juga memiliki 8 Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaannya sama seperti dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yaitu 1) Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sub bidang sesuai dengan ketentuan; 2) Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian sesuai jadwal dan ketentuan; 3) Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian; 4) Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Perekonomian Sesuai dengan ketentuan; 5) Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti; 6) Persentase Hasil Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah sub bidang Perekonomian; 7) Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Perekonomian sesuai dengan ketentuan; 8) Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Perekonomian ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung oleh 3 Sub-kegiatan sebagai berikut:

2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi antara bappelitbang dengan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dalam hal ini terdapat 10 perangkat daerah yang menjadi mitra bappelitbang lingkup perekonomian. Adapun koordinasi yang biasanya dilaksanakan terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada program pemerintah pusat, provinsi maupun pencapaian program prioritas kabupaten di lingkup ekonomi. beberapa koordinasi yang dilaksanakan ditahun ini diantaranya dalam hal penyusunan dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi, koordinasi terkait peningkatan hasil pertanian di kabupaten melalui forum komisi irigasi, koordinasi penyusunan RKP dana bagi hasil sawit dan koordinasi terkait perencanaan dan penetapan target pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Dalam pelaksanaannya Sub-kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). capaian indikator pada sub kegiatan ini sebesar 100% dimana dokumen rencana strategis (renstra) perangkat daerah yang disusun telah mempedomani petunjuk teknis penyusunan dokumen renstra yang ada, disertai penyusunan target indikator yang jelas, dan dapat diukur. adapun capaian lainnya selain penyusunan renstra perangkat daerah yaitu tercapainya koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2024 dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem serta

koordinasi penyusunan RKP DBH Sawit 2025 dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBH Sawit 2023-2024.

Identifikasi risiko kegiatan ini adalah tidak selarasnya program yang tercantum di renstra perangkat daerah dengan program yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPJMD). Belum optimalnya kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dapat berpengaruh pada program kegiatan pemerintah ditingkat daerah, provinsi dan tingkat pusat.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu masih adanya ego sektoral di perangkat daerah yang membuat perencanaan program kegiatan perangkat daerah belum selaras dengan perencanaan program kegiatan daerah; dan adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan pelaporan sehingga perlu adaptasi.

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya komitmen dari perangkat daerah untuk melaksanakan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dan sejalan dengan program perencanaan daerah, koordinasi dan kerjasama yang dijalankan antara bappelitbang dan perangkat daerah dapat berjalan dengan baik.

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp86.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.130.000,00 atau sebesar 80.68% dari total Anggaran

2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang ekonomi bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan

dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah belum optimalnya program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam renja dalam mendukung program kegiatan pemerintah daerah di dalam RKPD. Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan serta problem solving secara tertutup dengan perangkat daerah. Serta adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru yang menangani perencanaan dan pelaporan sehingga perlu adaptasi, karena mitra bappelitbang memang lebih banyak berhubungan dengan pejabat yang menangani program dan pelaporan di perangkat daerah.

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu adanya komitmen yang baik dari perangkat daerah untuk melaksanakan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dan sejalan dengan program tahunan daerah, rekomendasi dari hasil asistensi yang senantiasa ditindaklanjuti dan dijalankan oleh perangkat daerah.

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp75.155.000,00 dan terealisasi sebesar Rp62.544.000,00 atau sebesar 83.22% dari total Anggaran.

2.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini koordinasi serta asistensi kepada mitra bidang ekonomi bappelitbang yang berfokus kepada penyusunan laporan monitoring dan evaluasi terhadap renja/dpa perangkat daerah lingkup perekonomian agar laporan hasil monitoring dan evaluasi renja perangkat daerah memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di tahun berikutnya. Dimana tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah optimalisasi laporan monitoring dan evaluasi renja perangkat daerah sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di tahun berikutnya. Hal ini ditujukan untuk menindaklanjuti belum optimalnya laporan monitoring dan evaluasi renja. Identifikasi resiko dalam pelaksanaannya yaitu tidak selarasnya prioritas program kegiatan yang tercantum di renja perangkat berdasarkan capaian tahun sebelumnya, karena laporan hasil monev renja tidak dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan renja tahun berikutnya. Masalah ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan asistensi secara berkala kepada setiap perangkat daerah dalam

penyusunan laporan monev renja perangkat daerah tahunan, serta problem solving baik secara terbuka maupun tertutup dengan perangkat daerah mengenai hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. Adanya komitmen yang baik dari perangkat daerah untuk melaksanakan penyusunan laporan monev renja perangkat daerah sesuai dengan format yang sesuai dengan aturan, rekomendasi dari hasil asistensi penyusunan monev yang senantiasa ditindaklanjuti dan dijalankan oleh perangkat daerah menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp19.779.800,00 dan terealisasi sebesar Rp14.205.000,00 atau sebesar 71.82% dari total Anggaran.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini juga memiliki 8 Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaannya sama seperti dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yaitu 1) Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sub bidang sesuai dengan ketentuan; 2) Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian sesuai jadwal dan ketentuan; 3) Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian; 4) Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Perekonomian Sesuai dengan ketentuan; 5) Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen

perencanaan perangkat daerah Sub Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti; 6) Persentase Hasil Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah sub bidang Perekonomian; 7) Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Perekonomian sesuai dengan ketentuan; 8) Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Bidang Perekonomian ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didukung oleh 3 Sub-kegiatan sebagai berikut:

3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan Pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif efisien. Untuk itu diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama pada lingkup sub bidang perencanaan infrastruktur wilayah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin yang mencakup kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan, serta Komunikasi dan Informatika. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah belum optimalnya kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung program kegiatan pemerintah ditingkat daerah, provinsi dan tingkat pusat. Alternatif solusi

yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah untuk dapat mengarahkan program dan kegiatan yang dijalankan baik jangka menengah dan tahunan selaras untuk mendukung pencapaian program-program baik daerah, provinsi maupun pusat. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp74.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.578.300,00 atau sebesar 89.37% dari total Anggaran.

3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Infrastruktur bappelitbang terhadap kualitas dan keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan memastikan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah sesuai dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Risiko yang umum ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak selarasnya program kegiatan yang tercantum di renja perangkat daerah dengan program kegiatan yang ada pada RKPD. Yang mana atas risiko tersebut dilaksanakan alternatif solusi berupa pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan secara tertutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp84.860.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp63.007.200,00 atau sebesar 74.25% dari total Anggaran.

3.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berfokus asistensi mitra bidang Infrastruktur Bappelitbang terhadap Realisasi dari Renja SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur, menganalisa, memonitoring dan mengevaluasi hasil Renja SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Permasalahan yang umum dialami dalam pelaksanaan sub-kegiatan ini adalah belum optimalnya kinerja monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah dalam mendukung program kegiatan pemerintah daerah di dalam RKPD. Dan alternatif solusi yang diambil adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap renja perangkat daerah yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen monev triwulanan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan secara tertutup dengan perangkat daerah. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp25.554.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.854.600,00 atau sebesar 58.13% dari total Anggaran.

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah, telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang selaku Pihak Pertama dan Bupati Tapin selaku Pihak Pertama bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin memiliki sasaran kinerja yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator Indeks Innovative Government Awards (IGA) yang mana penilaian level daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diadakan setiap tahunnya. Adapun manfaat pengukuran indeks IGA ini antara lain:

- a. Mempercepat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup;
- b. Menciptakan kemandirian daerah dan daya saing daerah yang kompetitif;
- c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Bappelitbang Kabupaten Tapin menentukan target indikator nilai IGA sebesar 65. Sedangkan nilai IGA pada tahun 2024 terealisasi sebesar 68.67 atau dengan capaian kinerja sebesar 105,6% yang mana target indeks IGA telah dicapai.

1. Perbandingan realisasi Sasaran Kinerja 2 “Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Inovasi Daerah” tahun 2021-2024

Sasaran Kinerja menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala bappelitbang baru pada 2 (dua) tahun terakhir. Selama tahun

2023 dan 2024, nilai IGA Kabupaten naik yang semula sebagai Kabupaten “inovatif” kemudian pada tahun 2024 naik peringkat menjadi Kabupaten yang “sangat inovatif”. Tentunya Bappelitbang telah melakukan upaya untuk meningkatkan nilai IGA-nya yaitu dengan secara terus menerus memberikan fasilitasi layanan inovasi. Pelayanan inovasi ini rutin dilaksanakan setiap hari Rabu setiap minggunya. Fasilitas pembinaan inovasi ini dilaksanakan selain untuk menjangkau inovator/inovasi-inovasi baru juga melakukan monitoring kepada para inovator dan inovasi yang telah ada terdahulu. pembinaan yang dilakukan antara lain meningkatkan nilai tingkat kematangan suatu inovasi agar lolos dalam penilaian inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.7
Perbandingan Indeks IGA Tahun 2023 dengan tahun 2024

Tahun	Indeks IGA	Predikat
2023	52,94	Inovatif
2024	68,67	Sangat inovatif

Sumber : LKjIP Bappelitbang Tahun 2023, Monev Kinerja Bappelitbang Tahun 2014

2. Perbandingan realisasi kinerja Indeks Innovative Government Award (IGA) tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota yang sejenis

IGA merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memotivasi daerah meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dalam upaya peningkatan pelayanan apublik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indikator Kinerja nilai IGA Kabupaten Tapin lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai IGA yang diperoleh di Provinsi Kalimantan Selatan, dan nilai IGA

Kabupaten Tapin lebih Rendah bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun baik Kabupaten Tapin maupun Kabupaten Hulu Sungai Selatan sama-sama dalam kategori “**sangat inovatif**”.

Provinsi/Kabupaten/Kota	Predikat Inovasi Daerah Tahun 2024
Kalimantan Selatan	Inovatif
Banjarmasin	Inovatif
Banjarbaru	Inovatif
Tapin	Sangat inovatif
Hulu Sungai Selatan	Sangat inovatif
Tabalong	Terinovatif

3. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya hasil kelitbangan	Indeks IGA	68,67	70	98,10

Sumber: dokumen Renstra Bappelitbang 2024-2026 dan laporan monev 2024

4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Bappelitbang Tahun Anggaran 2024

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp)	(Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6/8)*100
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	7,75	7,76	100	4.875.215.120	3.865.316.325	79,28	124,49
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	65	68,67	105,64	1.930.293.120	1.421.547.500	73.64	143,46

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Tabel 3.10
Analisis Sasaran, Indikator, Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Innovative Government Award (IGA)	65	68,87	105,6	Bappelitbang Kab. Tapin berhasil mencapai target nilai IGA. Adanya arahan kepala daerah tentang pentingnya inovasi pada masing-masing perangkat daerah cukup membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi dan inovator.	Adanya pembinaan yang intensif kepada inovator dan inovasi baru atau yang telah ada secara rutin. Sosialisasi tentang inovasi daerah sampai ke masyarakat di desa, kelurahan dan kecamatan.

6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.11

Analisis Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang serta Program & Kegiatan yang mendukung keberhasilannya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Innovative Government Award (IGA)	105,64	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase <i>Policy Brief</i> Penelitian yang dimanfaatkan	100	Menunjang	Untuk meningkatkan nilai IGA maka diperlukan dukungan dari pelaksanaan program penelitian dan pengembangan daerah. Komponen nilai IGA ini termasuk didalamnya tentang kegiatan penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan program ini selain kegiatan kelitbangan juga tentang pembinaan inovasi dan inovator baru dan yang ada sebelumnya agar nilai kematangan inovasinya tinggi.
					Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100		
					Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	135,83		

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

I. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini mendukung sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah”. Dengan indikator kinerja Indeks Government awards. Indeks IGA merupakan suatu pengukuran tingkat inovasi pemerintah daerah yang dilakukn oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KemendagriRI). Pengukuran IGA bagi daerah bermanfaat untuk meningkatkan daya saing daerah, memberikan motivasi pemerintah daerah agar lebih kreatif, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pelaksanaan IGA yaitu:

- a) Mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik.
- b) Mengukur dan mengevaluasi sejauh mana inovasi diterapkan di daerah.
- c) Memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki inovasi terbaik.

Program penelitian dan pengembangan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang-bidang terkait aspek pembangunan, dan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi. Keterkaitan kegiatan ini dengan nilai IGA yaitu, bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan, menguji, dan mengimplementasikan inovasi daerah. Hasil kelitbangan dapat menjadi dasar atau ide menciptakan program-program inovatif daerah. Hasil kelitbangan membantu mengidentifikasi suatu masalah yang perlu dilakukan dengan inovasi. Penilaian IGA juga memperhitungkan implementasi penggunaan teknologi

informasi. Sehingga inovasi dan teknologi saling berkaitan, dimana teknologi menjadi alat utama dalam mewujudkan inovasi. Daerah harus mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal agar lebih inovatif, efisien, dan kompetitif. Untuk meningkatkan nilai IGA Bappelitbang Kabupaten Tapin melakukan penjangkaran inovasi, sosialisasi inovasi, dan pembinaan inovasi.

Dalam pelaksanaannya Program ini didukung oleh 2 Kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan Kependudukan

Penelitian menurut Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Pelaksanaan Penelitian. Salah satu indikator dari kualitas penelitian adalah penelitian dapat menghasilkan naskah akademik. Naskah akademik ini mencakup beberapa jenis naskah atau dokumen. Dimulai dari policy brief, rekomendasi kebijakan, sampai pada model kebijakan strategis, naskah akademik atau dokumen tersebut dapat dipilih salah satu sebagai bentuk keluaran dari kegiatan penelitian yang dilakukan.

1.1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Sub-kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Indikator Utama Daerah terkait peningkatan angka harapan lama sekolah dengan menyediakan data terkait. Penelitian yang dilaksanakan dengan judul penelitian Masterplan Kawasan Pendidikan Tehnologi dan Sains di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin hasil kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat dengan hasil rekomendasi Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi, Prioritas Infrastruktur Dasar, Pengembangan Model Pembiayaan Inovatif, Fokus pada Keberlanjutan Lingkungan, Optimalisasi Teknologi Modern, Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, Pemberdayaan Masyarakat Lokal, Strategi Promosi dan Daya Tarik Investasi

Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp514.194.450 dan terealisasi sebesar Rp443.951.000,00 atau sebesar 86,34% dari total Anggaran.

1.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial

Penelitian yang dilaksanakan dengan Kajian Persepsi Publik Atas Kinerja Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Kabupaten Tapin, kajian ini dilaksanakan atas hasil kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat dengan hasil rekomendasi sebanyak 93 rekomendasi dan dimanfaatkan oleh 31 Perangkat Daerah tema kajian yang kedua dari

sub kegiatan ini adalah tema Kajian Strategi Pengembangan Pariwisata Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan, Studi: Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, kajian ini dilaksanakan oleh Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin rekomendasi dan dapat dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari: Dinas Pariwisata, Kecamatan Piani, Dinas PUPR Kabupaten Tapin. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp389.871.900,00 dan terealisasi sebesar Rp309.155.000,00 atau sebesar 79,30% dari total Anggaran.

2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

2.1. Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Tema dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah pembuatan aplikasi Smart Sakip, hasil kerjasama dengan Smart ID Universitas Brawijaya Malang, sasaran dari pembuatan aplikasi ini untuk membangun sistem teknologi informasi/aplikasi untuk mengetahui dan menilai efisiensi dan integrasi proses implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kabupaten Tapin serta mengoptimalkan proses pemantauan, evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah kabupaten tapin.

Hasil penelitian ini dapat didownload secara gratis pada website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id pada menu repository . Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp246.978.000,00 dan

terrealisasi sebesar Rp203.567.700,00 atau sebesar 82,42% dari total Anggaran.

- 2.2. Sub Kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi

sub kegiatan ini melaksanakan pembinaan inovasi daerah dengan sasaran ASN Perangkat daerah sampai perangkat desa. Salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan adanya kegiatan pojok inovasi yang dilaksanakan setiap hari Rabu, sebagai wadah untuk pembinaan inovasi. Selain itu, juga dilaksanakan moment penghargaan untuk inovasi-inovasi yang berkualitas dalam acara Penghargaan Kreativitas dan Inovasi Daerah (KRISDA) Kabupaten Tapin 2024. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp672.409.470,00 dan terealisasi sebesar Rp434.496.000,00 atau sebesar 64,62% dari total Anggaran.

- 2.3. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

kegiatan ini fokus kepada rekomendasi hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah untuk dimanfaatkan baik untuk kajian lanjutan yang lebih teknis maupun langsung direalisasikan untuk menjadi pekerjaan perangkat daerah pada tahun berikutnya. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp106.839.300,00 dan terealisasi sebesar Rp40.063.800,00 atau sebesar 40,31% dari total Anggaran

2.4. Fasilitasi hak kekayaan intelektual

kegiatan ini bekerjasama dengan kementerian ham, yang mana pada tahun 2024, bidang penelitian dan pengembangan telah berhasil memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebanyak 3 hak cipta. Yaitu: 1) Hak cipta makalah OSC (memanfaatkan barang yang tidak terpakai di area tambang; 2) Hak cipta makalah pembuatan pupuk organik dari kayu apu; 3) hak cipta lagu mars RSUD Datu Sanggul. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp111.476.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.810.000,00 atau sebesar 27,64% dari total Anggaran.

Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Sasaran Strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kewajiban suatu instansi pemerintah atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis ini dapat dihitung dengan menggunakan indikator nilai dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin. Pada tahun 2024 Bappelitbang Kabupaten Tapin menentukan nilai LHE AKIP sebesar 78.55, dengan realisasi kinerja sebesar 85.95 atau sebesar 109,4% capaiannya.

1. Perbandingan realisasi Sasaran Kinerja 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” tahun 2021-2024

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Bappelitbang Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,43	76,50	76,60	79.00	85.95	109,4%

Sumber: Monev Kinerja Bappelitbang Tahun 2024

Untuk membandingkan realisasi nilai SAKIP Bappelitbang pada tahun 2021 dengan tahun 2023 dan tahun 2024, tidak bisa secara detail dibandingkan dengan alasan metode penilaian evaluasinya telah berbeda. Perubahan sistem penilaian pada tahun 2023 dan 2023 dengan tahun 2021 terletak pada komponen penilaian SAKIP tersebut. Dari lima komponen menjadi empat komponen penilaian.

2. Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” Dengan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin

Tabel 3.13
Realisasi Nilai SAKIP Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2023

Komponen	Bobot	Nilai Kab Tapin	Nilai Bappelitbang
1. Perencanaan Kinerja	30	23,29	27,00
2. Pengukuran Kinerja	30	21,87	25,20
3. Pelaporan Kinerja	15	10,59	12,75
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,25	21,00
Nilai Hasil Evaluasi	100	71,00	85,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

Sumber: LHE AKIP Bappelitbang dan LHE Pemkab Tapin

Berdasarkan hasil penilaian nilai SAKIP pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai SAKIP bappelitbang lebih tinggi daripada nilai SAKIP Pemerintah Daerah. akan tetapi kedua hasil penilain tersebut sama-sama mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Yang mana artinya, implementasi SAKIP baik di Bappelitbang ataupun pada Pemerintah Daerah sama-sama membaik.

3. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Berdasarkan target SAKIP Bappelitbang pada dokumen RENSTRA Bappelitbang 2024-2026, nilai SAKIP pada akhir tahun periode Renstra adalah 86,50. Sedangkan realisasi nilai SAKIP Berdasarkan LHE dari Inspektorat, nilai SAKIP Bappelitbang sebesar 85,95. Hal ini menggambarkan tingkat kemajuan nilai LHE SAKIP Bappelitbang telah mencapai tingkat kemjuaan sebesar 99,36 terhadap nilai akhir tahun periode Renstra Bappelitbang.

4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Dengan tingkat realisasi anggaran untuk program pendukung Indikator Kinerja ini yaitu sebesar 84,58% jika dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja ini yaitu menjadi sebesar 129,34%. Artinya tingkat keberhasilan kinerja lebih baik daripada capaian anggaran.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Nilai LHE SAKIP Bappelitbang tahun 2023 dikatakan berhasil mencapai targetnya. Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai LHE SAKIP Bappelitbang antara lain:

- ⇒ Kualitas perencanaan kinerja yang semakin baik, artinya program dan kegiatan selaras dengan tujuan strategis RPD dan yang mendukung prioritas nasional.
- ⇒ Peningkatan kualitas pengukuran kinerja.
- ⇒ Pelaporan kinerja yang lebih akuntabel dan terstruktur.

- ⇒ Meningkatnya efektivitas dan evaluasi internal Bappelitbang Kabupaten Tapin, yang dilaksanakan melalui rapat monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara rutin setiap triwulan.
- ⇒ Penguatan sistem informasi dan dokumentasi melalui penggunaan aplikasi SIPD dengan bukti dukung pelaksanaan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik dan informasinya terbuka untuk umum.
- ⇒ Kebijakan dan komitmen dari Kepala Bappelitbang dalam implementasi pelaksanaan SAKIP.
- ⇒ Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan SAKIP dengan kolaborasi antara Bagian Organisasi, Bappelitbang, dan Inspektorat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mendukung sasaran strategis Bappelitbang “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan Indikator Kinerja Utamanya Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pelaksanaan program ini mendukung kinerja ASN Bappelitbang dari penyediaan sarana prasarana pendukung kinerja, pelayanan kepegawaian yang memadai, terakomodirnya program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah. Seluruh kegiatan ini melaksanakan tugas-tugas administratif dan koordinatif yang Program ini memberikan pelayanan penunjang penyediaan sarana-prasarana barang milik daerah sehingga ASN Bappelitbang dapat bekerja dengan efektif, efisien serta inovatif.

Nilai SAKIP mencerminkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah. Program ini mendukung kenyamanan kinerja ASN Bappelitbang dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Bappelitbang. Selain itu, pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam program ini untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja secara akuntabel, seperti unsur yang ada pada penilaian SAKIP. Program ini memastikan seluruh kegiatan Bappelitbang berjalan dengan baik.

Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah”

Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN. IP ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, kedisiplinan, dan kualifikasi pendidikan ASN. Tujuan IP ASN yaitu untuk mengetahui standar profesionalitas ASN, Mengetahui kesesuaian kualifikasi ASN, mengetahui tingkat kinerja ASN, mengetahui kompetensi ASN, dan mengetahui kedisiplinan ASN.

1. Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja 4 “Meningkatnya Profesionalisme Asn Perangkat Daerah” Tahun 2021-2024

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi IP ASN Bappelitbang Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	47,80	70	78,51	112,15%

Indikator ini baru dapat diukur di Bappelitbang pada tahun 2023 dan 2024. Terjadi peningkatan nilai realisasi pada tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya, dari kategori “sangat rendah” menjadi kategori “**sedang**”. Upaya yang telah dilakukan oleh Bappelitbang dalam meningkatkan nilai IP-ASN yaitu sering mengikutsertakan pegawai Bappelitbang dalam pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan sosialisasi yang lain yang mampu meningkatkan kompetensinya.

2. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Berdasarkan target IP-ASN Bappelitbang pada dokumen RENSTRA Bappelitbang 2024-2026, nilai IP-ASN pada akhir tahun periode Renstra adalah 75. Sedangkan realisasi nilai IP-ASN berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapten Tapin, sebesar 78,51. Hal ini menggambarkan tingkat kemajuan nilai IP-ASN Bappelitbang telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 104,69% terhadap nilai akhir tahun periode Renstra Bappelitbang. Hal ini diakibatkan adanya penambahan peningkatan kapasitas SDM Bappelitbang yang meningkat.

3. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Dengan tingkat realisasi anggaran untuk program pendukung Indikator Kinerja ini yaitu sebesar 84,58%. Jika dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja ini yaitu menjadi sebesar 78,51%, maka perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran adalah sebesar 92,82%.

4. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mendukung sasaran strategis Bappelitbang sasaran strategis “Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah” dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah. Pelaksanaan program ini

mendukung kinerja ASN Bappelitbang dari penyediaan sarana prasarana pendukung kinerja, pelayanan kepegawaian yang memadai, terakomodirnya program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah. Seluruh kegiatan ini melaksanakan tugas-tugas administratif dan koordinatif yang mendukung kelancaran kegiatan operasional perangkat daerah. Dukungan program ini terhadap nilai Indeks Profesionalisme ASN Bappelitbang yaitu dalam hal pengukuran kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Salah satu contoh program ini dalam menunjang peningkatan kapasitas ASN Bappelitbang adalah dalam pemberian kesempatan untuk meningkatkan kompetensi ASN Bappelitbang. Program ini memberikan pelayanan penunjang penyediaan sarana-prasarana barang milik daerah sehingga ASN Bappelitbang dapat bekerja dengan efektif, efisien serta inovatif.

3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Data Anggaran dan Serapan Anggaran Bappelitbang Kab. Tapin Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.453.334.127	8.841.513.645	84,58
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.937.500	97.233.500	93,55
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.020.000	40.272.400	91.49

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.917.500	56.961.100	95.07
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.022.246.064	4.797.869.583	95.53
	3. Penyedia Gaji Tunjangan ASN	4.931.841.064	4.717.922.633	95.60
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD	37.515.000	33.422.000	89.09
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.890.000	49.524.950	93.64
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.640.899.466	2.765.103.461	75.95
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.056.600	33.535.643	55.84
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.085.800	76.775.100	57.69
	8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	275.047.400	184.552.300	67.10
	9. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	55.366.100	28.004.450	50.58
	10. Penyediaan Bahan/Material	172.647.491	113.343.245	65.65
	11. Fasilitas Kunjungan Tamu	42.150.000	33.940.000	80.52
	12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.902.546.075	2.294.952.723	79.07
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.287.000	309.010.079	83.45
	13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.287.000	309.010.079	83.45
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	984.717.537	734.281.553	74.57
	14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.386.492	458.616.373	80.40
	15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.837.285	120.875.000	71.17
	16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.493.760	154.790.180	63.31
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.246.560	138.015.469	41.67
	17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	215.423.320	115.616.477	53.67

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	18. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	115.823.240	22.398.992	19.34
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.545.786.720	2.713.265.300	76.52
7.	Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.314.472.720	1.990.356.300	86.00
	19. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	47.570.000	43.050.000	90.50
	20. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	112.202.500	84.960.000	75.72
	21. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	290.950.000	65.373.000	22.47
	22. Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	420.681.720	405.495.500	96.39
	23. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ kota	1.443.068.500	1.391.477.800	96.42
8.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	628.980.000	474.945.000	75.51
	24. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	244.000.000	150.500.000	61.68
	25. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	384.982.000	324.445.000	84.28
9.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	602.332.000	247.964.000	41.17
	26. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	437.982.000	153.080.000	34.95
	27. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	164.350.000	94.884.000	57.73
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.329.428.400	1.152.051.025	86.66
10.	Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	962.659.600	860.731.925	89.41

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Manusia			
28.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.122.000	65.050.000	76.42
29.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	64.670.000	54.040.000	83.56
30.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28.520.000	19.890.000	69.74
31.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	318.544.500	313.623.300	94.46
32.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.628.600	61.370.000	73.70
33.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	69.987.000	57.600.000	82.30
34.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.432.500	23.492.500	88.88
35.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	284.755.000	264.666.125	92.95
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	181.854.800	146.879.000	80.77
36.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.920.000	70.130.000	80.68
37.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.155.000	62.544.000	83.22

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	38. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.779.800	14.205.000	71.82
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	184.914.000	144.440.100	78.11
	39. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.500.000	66.578.300	89.37
	40. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	84.860.000	63.007.200	74.25
	41. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.554.000	14.854.600	58.13
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
13.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	904.066.350	753.106.000	83.30
	42. Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	389.871.900	309.155.000	79.30
	43. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	514.194.450	443.951.000	86.34
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.026.226.770	668.441.500	65.13
	44. Penelitian, pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	246.978.000	203.567.700	82.42
	45. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	672.409.470	434.496.000	64.62
	46. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	106.839.300	43.063.800	40.31
	47. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	111.476.000	30.810.000	27.64
JUMLAH		17.370.318.367	14.171.873.470	81.59

Sumber: aplikasi sipanda.tapinkab.go.id

Dukungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

(Bappelitbang) Kabupaten Tapin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappelitbang Kabupaten Tapin yang berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyerapan anggaran pada tahun 2024 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebesar 81,59% atau sebesar Rp14.171.873.470 (*Empat Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp17.370.318.367 (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*). Pagu anggaran belanja langsung tersebut, dijabarkan dalam rincian belanja:

⇒ Belanja Pegawai	Rp4.726.142.633
⇒ Belanja Barang dan Jasa	Rp9.150.030.837
⇒ Belanja Modal	Rp295.700.000

Berdasarkan data penyerapan anggaran pada tabel 3.9 diatas, secara umum pada tahun 2024 tidak terdapat permasalahan penyerapan anggaran yang signifikan. Hambatan dan kendala dalam penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja antara lain dikarenakan:

- 1) Perubahan metode belanja beberapa kegiatan menggunakan transaksi elektronik sehingga memakan waktu yang lebih lama.
- 2) Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan *time schedule* yang ada bisa dikarenakan kebijakan dari provinsi atau dari pusat, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut mundur dari *time line* yang dijadwalkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin memiliki 04 (empat) sasaran strategis dengan 03 (tiga) sasaran strategis tercapai dan 01 (satu) sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah perlu dukungan sumber daya aparatur, sarana prasarana yang lebih baik, bimbingan teknis perencanaan belum semua terakomodir, belum memiliki pejabat pengadaan sendiri.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana serta sarana pendukung lainnya secara optimal guna mencapai hasil yang optimal.
- 2) Penambahan jumlah tenaga teknis dan fungsional sehingga diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal.
- 3) Perlunya bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis aparatur.
- 4) Memaksimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap rencana program/kegiatan daerah dan perangkat daerah sejak proses penyusunan rancangan rencana kerja.
- 5) Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikatornya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi.
- 7) Sosialisasi yang intens tentang kegiatan inovasi daerah sampai ke desa-desa.
- 8) Konsisten melakukan pembinaan inovasi daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rantau, Juni 2025

Bappelitbang kab. tapin



Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE, ME
NIP. 19840522 200803 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Bappelitbang Tahun 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Meidy Harris Prayoga, S.E., M.E.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarifuddin, M.Pd.
Jabatan : Pj. Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 15 Februari 2024



Pihak Kedua,
Muhammad Syarifuddin, M.Pd.



Pihak Pertama,
Dr. H. Meidy Harris Prayoga, S.E., M.E.
NIP. 19840522 20083 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	7,75
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	Indeks Government Award (IGA)	65
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,35
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.931.712.645	Sumber Dana APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp4.588.357.830	Sumber Dana APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.619.510.000	Sumber Dana APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp2.221.052.576	Sumber Dana APBD

Rantau, 15 Februari 2024



Pj. Bupati Tapin,
Muhammad Syarifuddin, M.Pd.



**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan**
Dr. H. Meidy Harris Prayoga, S.E., M.E.
NIP. 19840522 20083 1 001

Lampiran 2 Matriks Renstra Perubahan Bappelitbang 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan																	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah																	
Meningkatnya Pencapaian Pembangunan Daerah dalam Mewujudkan Visi dan Misi Daerah																	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	0	100	3.973.929.515	100	1.975.000.000	100	2.156.228.500	100	8.105.158.015	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian			
				Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	80	80		90		100		100		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.519.611.167	100	1.285.000.000	100	1.404.119.500	100	5.208.730.667	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan			
		5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2	95.443.200	3	60.000.000	3	65.562.000	8	221.005.200	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kab. Tapin		
		5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	75.000.000	3	40.000.000	3	43.708.000	8	158.708.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kab. Tapin		

5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Dengan Satuan:Berita Acara)	0	1	300.000.000	2	150.000.000	2	163.905.000	5	613.905.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kab. Tapin
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Berita Acara)	1	2	80.915.000	2	60.000.000	2	65.562.000	6	206.477.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kab. Tapin
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	1	2	590.805.000	1	250.000.000	1	273.175.000	4	1.113.980.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kab. Tapin
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Dengan Satuan:Usulan)	-	405	382.506.757	405	225.000.000	405	245.857.500	1215	853.364.257	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kab Tapin , Semua Kecamatan
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3	994.941.210	2	500.000.000	3	546.350.000	8	2.041.291.210	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kab. Tapin
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas (Dengan Satuan:Persen)	0	100	691.015.000	100	370.000.000	100	399.664.000	0	1.460.679.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dengan Satuan:Masukan)	1	1	291.015.000	1	150.000.000	1	163.905.000	3	604.920.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kab. Tapin
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan:Orang)	0	53	200.000.000	53	120.000.000	53	131.124.000	159	451.124.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kab. Tapin

	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan:Buku)	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	104.635.000	3	404.635.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kab. Tapin
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai (Dengan Satuan:Persen)	100	100	763.303.348	100	320.000.000	100	352.445.000	100	1.435.748.348	JF Perencana Sub Bidang Pengendalian	Kabupaten Tapin
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	485.172.318	1	170.000.000	1	188.540.000	3	843.712.318	JF Perencana Sub Bidang Pengendalian	Kab. Tapin
	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Dengan Satuan:Kerja Sama)	0	1	100.000.000	1	50.000.000	1	54.635.000	3	204.635.000	JF Perencana Sub Bidang Pengendalian	Kab. Tapin
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	178.131.030	4	100.000.000	4	109.270.000	12	387.401.030	JF Perencana Sub Bidang Pengendalian	Kab. Tapin
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.620.093.988	100	1.178.143.000	100	1.287.362.000	100	5.085.598.988	Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kab. Tapin
			Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kab. Tapin
			Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra ekonomi dan Infrastrukturnya yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kab. Tapin

			Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kab. Tapin
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	930.539.700	100	413.143.000	100	451.447.000	100	1.795.129.700	JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kab. Tapin	
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kab. Tapin	
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kab. Tapin	
		Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kab. Tapin	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2	151.193.000	2	63.143.000	3	68.997.000	7	283.333.000	JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kab. Tapin	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	9	9	101.807.000	9	35.000.000	9	38.245.000	27	175.052.000	JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kab. Tapin	

5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	70.840.200	4	40.000.000	4	43.708.000	12	154.548.200	JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kab. Tapin
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	150.000.000	1	65.000.000	1	71.028.000	3	286.028.000	JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kab. Tapin
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2	153.600.000	2	65.000.000	3	71.028.000	7	289.628.000	JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kab. Tapin
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	9	9	108.032.100	9	40.000.000	9	43.708.000	27	191.740.100	JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kab. Tapin
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	9	9	70.067.400	9	40.000.000	9	43.708.000	27	153.775.400	JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kab. Tapin
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	125.000.000	1	65.000.000	1	71.025.000	3	261.025.000	JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kab. Tapin
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	90	90	759.407.200	90	405.000.000	90	442.543.000	90	1.606.950.200	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin

			Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100		JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2	132.000.000	2	75.000.000	3	81.952.500	7	288.952.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	10	10	79.825.200	10	35.000.000	10	38.244.500	30	153.069.700	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	10	10	57.582.000	10	35.000.000	10	38.244.500	30	130.826.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	120.000.000	1	65.000.000	1	71.025.000	3	256.025.000	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	80.000.000	2	50.000.000	3	54.635.000	7	184.635.000	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	10	80.000.000	10	35.000.000	10	38.244.500	30	153.244.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin	

5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	10	60.000.000	10	35.000.000	10	38.244.500	30	133.244.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang SDA (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	150.000.000	1	75.000.000	1	81.952.500	3	306.952.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	930.147.088	100	360.000.000	100	393.372.000	100	1.683.519.088	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/DP) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2	141.545.960	2	65.000.000	3	71.025.500	7	277.571.460	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	17	17	95.811.000	17	35.000.000	17	38.244.500	51	169.055.500	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	17	17	70.848.000	17	35.000.000	17	38.244.500	51	144.092.500	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin

	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	149.908.080	1	65.000.000	1	71.025.500	3	285.933.580	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	145.000.000	2	40.000.000	3	43.708.000	7	228.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	17	97.034.048	17	40.000.000	17	43.708.000	51	180.742.048	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	17	80.000.000	17	40.000.000	17	43.708.000	51	163.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	150.000.000	1	40.000.000	1	43.708.000	3	233.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan														
	Meningkatnya hasil kelitbangan													
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang direplikasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.471.877.200,00	100	645.000.000,00	100	704.640.000,00	100	4.821.517.200	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kabu paten Tapin
			Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kabu paten Tapin

	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	150.000.000	100	25.000.000	100	27.317.500	100	202.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	150.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	202.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.035.000.000	100	225.000.000	100	245.857.500	100	1.505.857.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin

	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi.. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.239.577.200	100	250.000.000	100	273.175.000	100	1.762.752.200	JF Peneliti	
	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	204.577.200	1	25.000.000	1	27.317.500	3	256.894.700	JF Peneliti	Kabu paten Tapin

5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang dihimpun dalam database inovasi daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.047.300.000	100	145.000.000	100	158.290.000	100	1.350.590.000	JF PEMANFAATAN IPTEK	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	277.200.000	1	25.000.000	1	27.390.000	3	329.590.000	JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabu paten Tapin

	5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	356.000.000	1	20.000.000	1	21.900.000	3	397.900.000	JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	214.100.000	1	75.000.000	1	82.000.000	3	371.100.000	JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin
	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	200.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	3	252.000.000	JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah														
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)														
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.231.982.573,00	100	8.015.063.964,00	100	8.760.750.867,00	100	29.007.797.404	SEKRETARIS	Bappelitbang
			Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		SEKRETARIS	
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		SEKRETARIS	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub-kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	161.916.000	100	80.000.000	100	88.105.000	100	330.021.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
			Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	

			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	5	39.750.000	5	30.000.000	8	33.470.000	18	103.220.000		Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	5	42.400.000	5	10.000.000	8	10.927.000	18	63.327.000		Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	9	11	37.366.000	11	30.000.000	11	32.781.000	33	100.147.000		Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	11	42.400.000	11	10.000.000	11	10.927.000	33	63.327.000		Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penata usahaan keuangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	5.296.774.201	100	5.265.063.964	100	5.781.931.867	100	16.343.770.032		Kasubag Keuangan	Bappelitbang
		Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kasubag Keuangan	
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kasubag Keuangan	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	23	25	5.235.274.201	25	5.235.063.964	25	5.749.431.867	2	16.219.770.032		Kasubag Keuangan	Bappelitbang

5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	30.000.000	1	15.000.000	1	16.300.000	3	61.300.000	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	31.500.000	1	15.000.000	1	16.200.000	3	62.700.000	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (Dengan Satuan:Score)	4,3	4,3	4.281.992.372	4,4	1.265.000.000	4,5	1.350.499.500	4,5	6.897.491.872	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Umum dan Kepegawaian	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12	99.800.000	12	35.000.000	12	38.000.000	36	172.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12	1.455.000.000	12	425.000.000	12	464.000.000	36	2.344.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12	239.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	36	449.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	47.000.000	12	20.000.000	12	21.854.000	36	88.854.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	342.000.000	12	150.000.000	12	133.905.000	36	625.905.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	23.793.000	12	15.000.000	12	16.390.500	36	55.183.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	2.055.399.372	12	500.000.000	12	546.350.000	36	3.101.749.372	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	796.000.000	100	400.000.000	100	418.540.000	100	1.614.540.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	10	596.000.000	10	200.000.000	10	218.540.000	30	1.014.540.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	25	200.000.000	20	200.000.000	15	200.000.000	50	600.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.142.300.000	100	675.000.000	100	737.572.500	100	2.554.872.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	688.000.000	12	450.000.000	12	491.715.000	36	1.629.715.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	270.300.000	12	125.000.000	12	136.587.500	36	531.887.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	184.000.000	12	100.000.000	12	109.270.000	36	393.270.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	553.000.000	100	330.000.000	100	384.102.000	100	1.267.102.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	377.000.000	10	195.000.000	10	245.857.500	30	817.857.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	20	76.000.000	20	35.000.000	20	38.244.500	60	149.244.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabu paten Tapin
PERUBAHAN RENSTRA 2024-2026														
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah													

	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.973.929.515	100	1.975.000.000	100	2.156.228.500	100	8.105.158.015	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
			Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
			Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data (Dengan Satuan:Persen)	80	80		90		100		100		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100%	100		100		100		100		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
			Presentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persen)	92%	91,72 %		93,00%		95%		95%		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah (Dengan Satuan:Persen)	80%	80%		85%		90%		90%		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.519.611.167	100	1.285.000.000	100	1.404.119.500	100	5.208.730.667	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
			Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	

				Persentase asistensi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
				Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
				Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	80	80		90		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1	2	95.443.200	3	60.000.000	2	65.562.000	7	221.005.200	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabupaten Tapin	
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2	75.000.000	3	40.000.000	2	43.708.000	7	158.708.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabupaten Tapin	
	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0	1	300.000.000	2	150.000.000	1	163.905.000	4	613.905.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabupaten Tapin	
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	2	80.915.000	1	60.000.000	1	65.562.000	3	206.477.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabupaten Tapin	
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota	1	1	590.805.000	2	250.000.000	1	273.175.000	4	1.113.980.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabupaten Tapin	
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	405	382.506.757	405	225.000.000	405	245.857.500	1215	853.364.257	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabupaten Tapin ,Semua Kecamatan	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1	3	994.941.210	2	500.000.000	3	546.350.000	8	2.041.291.210	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabupaten Tapin	

	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	80	80	691.015.000	90	370.000.000	100	399.664.000	100	1.460.679.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabu paten Tapin
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	291.015.000	1	150.000.000	1	163.905.000	3	604.920.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabu paten Tapin
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0	53	200.000.000	53	120.000.000	53	131.124.000	159	451.124.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabu paten Tapin
	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	104.635.000	3	404.635.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabu paten Tapin
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	763.303.348	100	320.000.000	100	352.445.000	100	1.435.748.348	JF Perencana Sub Bidang Pengendalian	Kabu paten Tapin
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	1	485.172.318	1	170.000.000	1	188.540.000	3	843.712.318		Kabu paten Tapin
	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	0	1	100.000.000	1	50.000.000	1	54.635.000	3	204.635.000		Kabu paten Tapin
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	4	178.131.030	4	100.000.000	4	109.270.000	12	387.401.030		Kabu paten Tapin

	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.620.093.988	100	1.178.143.000	100	1.287.362.000	100	5.085.598.988	Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kabu paten Tapin
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabu paten Tapin
			Persentase Keselarasan Renja OPD bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)		100		100		100		1100		Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kabu paten Tapin
			Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)		100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabu paten Tapin
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabu paten Tapin
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabu paten Tapin
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM (Dengan Satuan:Persen)	80	80		85		90		90		Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kabu paten Tapin
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan:Persen)		80		85		90		90		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabu paten Tapin

	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	930.539.700	100	413.143.000	100	451.447.000	100	1.795.129.700	JF Perencan Sub Bidang Sosial	Kabu paten Tapin
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang sosial sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			Kabu paten Tapin
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			Kabu paten Tapin
			Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang sosial Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin

				Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100			Kabu paten Tapin
				Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kabu paten Tapin
				Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100			Kabu paten Tapin
				Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100			Kabu paten Tapin
				Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang SDM Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100			Kabu paten Tapin
				Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100			Kabu paten Tapin
				Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100			Kabu paten Tapin

			Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	151.193.000	3	63.143.000	2	68.997.000	8	283.333.000		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	3	101.807.000	3	35.000.000	2	38.245.000	8	175.052.000		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	70.840.200	4	40.000.000	4	43.708.000	12	154.548.200		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0	1	150.000.000	1	65.000.000	1	71.028.000	3	286.028.000		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	153.600.000	3	65.000.000	2	71.028.000	8	289.628.000		Kabu paten Tapin

	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	3	108.032.100	3	40.000.000	2	43.708.000	8	191.740.100		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	4	70.067.400	4	40.000.000	4	43.708.000	12	153.775.400		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0	1	125.000.000	1	65.000.000	1	71.025.000	3	261.025.000		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	759.407.200	100	405.000.000	100	442.543.000	100	1.606.950.200	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabu paten Tapin
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			
			Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			
			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Ekonomi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			

				Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			
				Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	3	132.000.000	3	75.000.000	2	81.952.500	8	288.952.500			Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0	3	79.825.200	3	35.000.000	2	38.244.500	8	153.069.700			Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	57.582.000	4	35.000.000	4	38.244.500	12	130.826.500			Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0	1	120.000.000	1	65.000.000	1	71.025.000	3	256.025.000			Kabu paten Tapin

	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	3	80.000.000	2	50.000.000	3	54.635.000	8	184.635.000		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	3	80.000.000	2	35.000.000	3	38.244.500	8	153.244.500		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	4	60.000.000	4	35.000.000	4	38.244.500	12	133.244.500		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0	1	150.000.000	1	75.000.000	1	81.952.500	3	306.952.500		Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	930.147.088	100	360.000.000	100	393.372.000	100	1.683.519.088	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			Kabu paten Tapin
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			Kabu paten Tapin
			Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin

				Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
				Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
				Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
				Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100			Kabu paten Tapin
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	141.545.960	3	65.000.000	2	71.025.500	8	277.571.460	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin	
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0	3	95.811.000	3	35.000.000	2	38.244.500	8	169.055.500	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin	
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	70.848.000	4	35.000.000	4	38.244.500	12	144.092.500	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin	

	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0	1	149.908.080	1	65.000.000	1	71.025.500	3	285.933.580	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	3	145.000.000	2	40.000.000	3	43.708.000	8	228.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	3	97.034.048	2	40.000.000	3	43.708.000	8	180.742.048	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	4	80.000.000	4	40.000.000	4	43.708.000	12	163.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0	1	150.000.000	1	40.000.000	1	43.708.000	3	233.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah														
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.471.877.200	100	645.000.000	100	704.640.000	100	4.821.517.200	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Tapin
			Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Tapin

				Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan (Dengan Satuan:Persen)	73,62	73,62		76,69		79,75		79,75			Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	150.000.000	100	25.000.000	100	27.317.500	100	202.317.500	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
				Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
				Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
		5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0	1	150.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	202.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.035.000.000	100	225.000.000	100	245.857.500	100	1.505.857.500	JF Peneliti	
				Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
				Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
		5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang	1	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin

			Aspek-Aspek Sosia											
	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.239.577.200	100	250.000.000	100	273.175.000	100	1.762.752.200	JF Peneliti	Kabu paten Tapin
			Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	Kabu paten Tapin
			Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	Kabu paten Tapin

				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	204.577.200	1	25.000.000	1	27.317.500	3	256.894.700		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	umlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabu paten Tapin
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	30,67	30,67	1.047.300.000	33,74	145.000.000	36,81	158.290.000	36,81	1.350.590.000	JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabu paten Tapin

				Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	80	80		90		100		100		JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabu paten Tapin
				Persentase inovasi daerah yang direplikasi	0	23,70		25,93		25,93		25,93		JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabu paten Tapin
				Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100	100		100		100		100		JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabu paten Tapin
				Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	73,62	73,62		76,69		79,75		79,75		JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabu paten Tapin
				Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100	100		100		100		100		JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	1	277.200.000	1	25.000.000	1	27.390.000	3	329.590.000		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	356.000.000	1	20.000.000	1	21.900.000	3	397.900.000		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	214.100.000	1	75.000.000	1	82.000.000	3	371.100.000		Kabu paten Tapin
	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	1	200.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	3	252.000.000		Kabu paten Tapin
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah															
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Kinerja (Dengan Satuan:Nilai)	25,00 25,00 11,55 16,80	25,00 25,00 11,55 16,80	12.231.982.573	26,00 26,00 12,00 18,00	8.015.063.964	27,00 27,00 12,50 20,00	8.760.750.867	27,00 27,00 12,50 20,00	29.007.797.404	SEKRETARIS	Bappe litbang	


			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS	Bappe litbang
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		litbang	Bappe litbang
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:Sscore)	4	4		4		4		4		SEKRETARIS	Bappe litbang
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	161.916.000	100	80.000.000	100	88.105.000	100	330.021.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappe litbang
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappe litbang
			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappe litbang
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	6	39.750.000	5	30.000.000	8	33.470.000	19	103.220.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappe litbang
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	5	42.400.000	5	10.000.000	8	10.927.000	18	63.327.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappe litbang
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	11	37.366.000	11	30.000.000	11	32.781.000	33	100.147.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappe litbang
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	11	42.400.000	11	10.000.000	11	10.927.000	33	63.327.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappe litbang
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	5.296.774.201	100	5.265.063.964	100	5.781.931.867	100	16.343.770.032	Kasubag Keuangan	Bappe litbang

			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100		Kasubag Keuangan	Bappelitbang
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	25	5.235.274.201	25	5.235.063.964	25	5.749.431.867	25	16.219.770.032	Kasubag Keuangan	Bappe litbang
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	30.000.000	1	15.000.000	1	16.300.000	3	61.300.000	Kasubag Keuangan	Bappe litbang
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	31.500.000	1	15.000.000	1	16.200.000	3	62.700.000	Kasubag Keuangan	Bappe litbang
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:Person)	100	100	4.281.992.372	100	1.265.000.000	100	1.350.499.500	100	6.897.491.872	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	99.800.000	1	35.000.000	1	38.000.000	3	172.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1.455.000.000	1	425.000.000	1	464.000.000	3	2.344.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	239.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	3	449.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	47.000.000	1	20.000.000	1	21.854.000	3	88.854.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	342.000.000	1	150.000.000	1	133.905.000	3	625.905.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang

	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1	23.793.000	1	15.000.000	1	16.390.500	3	55.183.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	2.055.399.372	1	500.000.000	1	546.350.000	3	3.101.749.372	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	31,45	80	796.000.000	83,5	400.000.000	85	418.540.000	100	1.614.540.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	10	596.000.000	10	200.000.000	10	218.540.000	30	1.014.540.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.142.300.000	100	675.000.000	100	737.572.500	100	2.554.872.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	1	688.000.000	1	450.000.000	1	491.715.000	3	1.629.715.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	270.300.000	1	125.000.000	1	136.587.500	3	531.887.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1	184.000.000	1	100.000.000	1	109.270.000	3	393.270.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	83,28	80	553.000.000	83,5	330.000.000	85	384.102.000	85	1.267.102.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang

5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	377.000.000	10	195.000.000	10	245.857.500	30	817.857.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	20	76.000.000	20	35.000.000	20	38.244.500	60	149.244.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappe litbang
TOTAL:					22.297.883.276		11.813.206.964		12.908.981.367		47.020.071.607		

Lampiran 3 LHE SAKIP Bappelitbang Tahun 2023


PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT
 Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Rantau

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN
 Nomor : 700.1.2.1/013/Evaluasi.SAKIP/W.IV/INSP/III/2024
 Tanggal 26 Maret 2024

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV


 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT
 Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax (0517) 31601
 RANTAU

Nomor : 700.1.2.1/013/Eva.Sakip / W.IV/INSP/III/ 2024 Rantau, 26 Maret 2024
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Kepada
 Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
 di
 Rantau

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk : (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP ; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD). Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin berupaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan menindaklanjuti pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e sakip V.II.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menindaklanjuti hasil evaluasi terkait analisis dan evaluasi yang diperbandingkan dengan target nasional/internasional. Perbandingan belum dapat dilakukan disebabkan adanya perbedaan dalam menentukan indikator dan target perencanaan dan penelitian dengan daerah lain.
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan menindaklanjuti evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi aplikasi e-sakip V2 yang dapat diakses melalui tautan <https://admin.esakip.tapinkab.go.id/login>
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dengan adanya penyusunan cascading dan pohon kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menunjukkan nilai sebesar **85,95** dengan predikat "memuaskan", yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pemukuran kinerja dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
		2023	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,95
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja Tahun 2023 di Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Tapin.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK). Adapun perencanaan kinerja, mengacu pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kriteria kriteria atas komponen penilaian Perencanaan kinerja telah terpenuhi dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai selidiknya dipertahankan dalam (1) satu tahun terakhir. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

2) Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin telah menyusun PK dan rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja. Pengumpulan kinerja dilakukan secara berkala (trivulan) melalui aplikasi E-Sakip. Namun saat ini aplikasi E-Sakip tidak dapat dijadikan alat /media teknologi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan monitoring secara berkala mulai dari kinerja pada level atas sampai dengan level individu.

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja yang telah disusun menggambarkan kinerja, memenuhi standar kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan. Namun pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, yakni terkait dengan pengaruh perubahan budaya kinerja pada organisasi

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Telah ada pedoman formal atas evaluasi AKIP di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yaitu Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik melalui movev berkala maupun lembar evaluasi mandiri

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Pengukuran Kinerja dengan menggunakan teknologi informasi dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta dapat dimanfaatkan.
- b. Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berpedoman pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP.
- c. Agar Menyusun maklumat pelayanan atau standar pelayanan yang diformalkan sebagai upaya perbaikan budaya kerja instansi terkait.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi AKIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi AKIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

4

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi AKIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi AKIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.




Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.




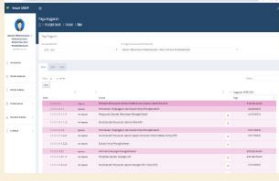
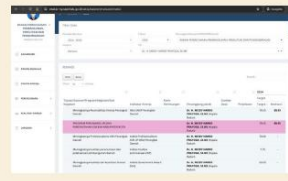
5

Lampiran 4 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023


TINDAKLANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA




No.	SARAN/REKOMENDASI LHE AKIP	TINDAK LANJUT
1.	Mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dapat dimanfaatkan	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-sakip NG


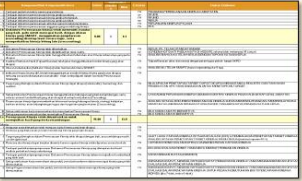
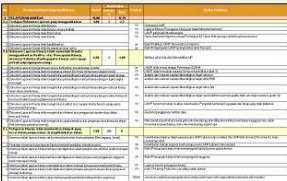
esakip-ng.tapinkab.go.id
 Username: op28
 Password : op28tapin




TINDAKLANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA








No.	SARAN/REKOMENDASI LHE AKIP	TINDAK LANJUT
1.	Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berpedoman pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP	Dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, Bappelitbang telah melakukan penilaian mandiri oleh Tim SAKIP Bappelitbang dengan menggunakan KKE Internal yang berpedoman pada Perbup Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi AKIP









TINDAKLANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

No.	SARAN/REKOMENDASI LHE AKIP	TINDAK LANJUT
1.	Agar Menyusun maklumat pelayanan atau standar pelayanan yang diformalkan sebagai upaya perbaikan budaya kerja instansi terkait	Dalam upaya peningkatan pelayanan Bappelitbang berkomitmen dalam bentuk Maklumat Pelayanan yang diformalkan oleh Kepala Bappelitbang.






Lampiran 5 Prestasi Bappelitbang Tahun 2024

- a. Kabupaten Tapin menerima penghargaan sebagai **Kabupaten Sangat Inovatif** dengan nilai indeks 68,67



SALINAN


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 400.10.11 - 4898 TAHUN 2024
 TENTANG
 INDEKS INOVASI DAERAH
 PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024
 MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kabupaten Banyuwangi	98,86	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbendo	94,13	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Sragen	93,98	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Balangan	93,77	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Tabalong	91,21	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Wonogiri	90,20	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Bangka	88,78	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Bogor	88,21	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Sampang	88,17	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Mesuji	87,37	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Padang Pariaman	85,73	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Boyolali	83,64	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Blora	82,61	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Bangkalan	82,37	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Ogan Ilir	79,45	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Pati	78,40	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Lamongan	78,20	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Pamekasan	76,35	Sangat Inovatif
19	Kabupaten Sidoarjo	75,96	Sangat Inovatif
20	Kabupaten Ngawi	73,96	Sangat Inovatif
21	Kabupaten Sumedang	73,23	Sangat Inovatif
22	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	73,15	Sangat Inovatif
23	Kabupaten Blitar	72,59	Sangat Inovatif
24	Kabupaten Temanggung	72,42	Sangat Inovatif
25	Kabupaten Lampung Selatan	71,40	Sangat Inovatif
26	Kabupaten Bantul	71,30	Sangat Inovatif
27	Kabupaten Jember	71,09	Sangat Inovatif
28	Kabupaten Hulu Sungai Utara	70,98	Sangat Inovatif
29	Kabupaten Trenggalek	69,98	Sangat Inovatif
30	Kabupaten Lampung Barat	69,93	Sangat Inovatif
31	Kabupaten Tapin	68,67	Sangat Inovatif
32	Kabupaten Pringsewu	68,33	Sangat Inovatif
33	Kabupaten Klaten	67,89	Sangat Inovatif
34	Kabupaten Tegal	67,80	Sangat Inovatif
35	Kabupaten Klungkung	67,75	Sangat Inovatif
36	Kabupaten Pasuruan	67,70	Sangat Inovatif
37	Kabupaten Dompu	67,43	Sangat Inovatif

- b. Pemerintah Kabupaten Tapin meraih penghargaan Terbaik III pembangunan daerah Kalsel



- c. Meraih penghargaan terbaik II sebagai Fasilitas Layanan Kekayaan Intelektual Terbaik, *Mobile Intellectual Property Clinic* (MIPC) ke-3 yang digelar Kanwil Kalsel Kemenkumham RI

